



RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2022



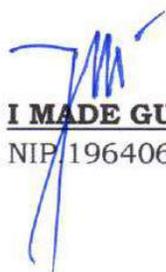
**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali 2018-2023, dengan mempertimbangkan pokok-pokok arahan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan Akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 memuat rancangan program dan kegiatan serta pendanaannya mempertimbangkan kerangka kebijakan pendanaan dan pagu indikatif untuk penyusunan awal RKPD Tahun 2022. Berdasarkan acuan tersebut, maka rencana kerja dan pendanaan pada Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali merupakan wujud dari pola perencanaan teknokratik dan partisipatif sehingga menciptakan sebuah komitmen perencanaan untuk dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dan mitra kerjanya.

Rancangan Akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja serta sebagai panduan untuk pelaksanaan program/kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

KEPALA BADAN



I MADE GUNAJA

NIP/19640620 199003 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error!
Bookmark not defined.	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH INDUK 2020.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	29
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	32
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	37
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	50
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	50
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	52
3.3 Program dan Kegiatan	53
BAB IV RANCANGAN RENJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	54
BAB V PENUTUP	65
5.1 Catatan Penting	65
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	Error! Bookmark not defined.
5.3 Tindak Lanjut	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	23
Tabel 2.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	29
Tabel 2.3	Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2021.....	30
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	31
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	35
Tabel 2.6	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022.....	38
Tabel 2.7	Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Provinsi Bali.....	40
Tabel 4.1	Renja dan Pendanaan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan yang tepat merupakan langkah awal menuju gerbang keberhasilan suatu program/ kegiatan. Kegagalan dalam pelaksanaan Program/Kegiatan bisa diakibatkan oleh perencanaan yang tidak matang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dijelaskan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional, adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Fungsi dari perencanaan adalah memberikan pedoman, pegangan dan arah, serta memudahkan pengawasan dan evaluasi yang teratur serta sebagai alat koordinasi.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan, dan disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat

Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah, serta untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan akhir Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Sesuai dengan kedudukannya, Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah unsur fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dalam penyelenggaraan tugasnya mempunyai fungsi : perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah; pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah. Penyusunan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah mencakup analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu.

Karenanya, Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 memuat program/kegiatan perencanaan terkait urusan Pemerintahan Daerah dibidang Riset dan Pengembangan Penelitian Daerah, berisikan tentang informasi rancangan rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran dan rancangan pendanaannya dengan mempertimbangkan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tupoksinya, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1447 Tahun 2019);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 7);
19. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali tanggal 20 Januari 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 2);

1.3 Maksud

Maksud penyusunan Rancangan Akhir rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai pedoman untuk mewujudkan sinergitas, keselarasan, dan konsistensi antara perencanaan penganggaran program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

Tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023
- 2) Rancangan program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 beserta pagu inidkatif pendanaannya.
- 3) Sinkronisasi dan sinergisitas program dan kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 berdasarkan hasil saran/masukan para *stakeholder* terkait.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan akhir rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Desa Provinsi Bali sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas tentang fungsi Perencanaan, keterkaitan Rencana Kerja dengan Rencana Strategis, isi secara ringkas Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Peraturan Perundang-Undangan yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;

1.3 Maksud Dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022;

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 serta susunan garis besar isi dokumen;

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Induk 2020

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Induk 2020 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan capaian tahun 2020.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

- 2.4 Review terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Review terhadap RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Rencana Strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk melaksanakan Riset dan Inovasi serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi Bali yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi Bali berdasarkan RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

BAB III Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan,

Bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu :

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, pada bagian ini, tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
- 3.3 Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian (dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan), kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2020

Untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran serta indikator Sasaran yang telah ditetapkan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, dirumuskan strategi untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Strategi yang dimaksud merupakan langkah yang berisikan program dan kegiatan sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk periode perencanaan Tahun 2020, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah merumuskan Rencana Kerja Program/Kegiatan dan Kerangka Pendanaan. Namun demikian, paradigma perencanaan pembangunan tentunya tidak akan berjalan statis, namun dinamis seiring dengan semakin berkembangnya permasalahan pembangunan. Kondisi demikian membutuhkan penyesuaian dalam penetapan rencana program, kegiatan, indikator kinerja maupun pendanaannya.

A. Rencana Kerja Program Kegiatan Tahun Anggaran 2020;

Rencana Kerja Urusan Penelitian Dan Pengembangan diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.158.458.402,00 pada rencana pos belanja langsung T.A 2020. Alokasi anggaran tersebut diatas diantaranya diarahkan untuk melaksanakan program Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada **Badan Riset dan Inovasi Daerah** Provinsi Bali Tahun Anggaran 2020 untuk mendukung Prioritas Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik dengan Sasaran Terwujudnya tata Kelola Pemerintahan Yang Baik serta Meningkatnya Pelayanan Sektor Publik yang didukung 4 (empat) program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja Kegiatan:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- g. Penyediaan Makanan dan Minuman
- h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
- i. Upacara Keagamaan
- j. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- k. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- l. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
- n. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja
- o. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2. Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Kegiatan:

- a. Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan, dan pelaksanaan sistem informasi data.
- b. Pengkajian peraturan perundang-undangan.
- c. Percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah.
- d. Pengkajian/penelitian bidang pemerintahan desa.
- e. Pengkajian/penelitian bidang pemerintah
- f. Pemecahan masalah daerah

3. Program prioritas pembangunan Bali:

- a. Kajian/penelitian bidang pangan, sandang dan papan
- b. Kajian/penelitian, pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial
- c. Kajian/penelitian bidang adat, tradisi seni budaya dan pariwisata

4. program penunjang pembangunan Bali:

- a. Kajian/penelitian bidang infrastruktur.
- b. Kajian/penelitian bidang ekonomi.
- c. Kajian/penelitian bidang keamanan.
- d. Ekonomi Makro

5. program pengelolaan kekayaan intelektual.

- a. Pembinaan inventarisasi dan Fasilitasi karya Inovasi dan Teknologi.
- b. Diseminasi hak kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi daerah.
- c. Pengembangan, penerapan inovasi dan teknologi.

B. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020

1) Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja (Rutin)

Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja dengan anggaran sebesar Rp 2.671.322.030,00 bertujuan untuk mewujudkan meningkatnya kualitas pelayanan publik. Indikator kinerja program adalah Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja dengan target sebesar Rp.2.671.322.030,00 Realisasi capaian kinerja sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp 2.532.554.375,00 (93.33%).

Adapun kegiatan yang mendukung Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja adalah sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk kelancaran tugas dinas. Indikator kinerja kegiatan adalah tersedianya materai dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp3.075.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.075.000,00

- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini terlayannya proses pelayanan serta terwujudnya suasana kantor yang nyaman. Indikator kinerja kegiatan adalah terbayarnya jasa komunikasi, air dan listrik dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.143.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 110.699.500,00.
- c) Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Suasana Kantor yang Bersih, Nyaman dan Ruangan Yang Tertata. Indikator kinerja kegiatan adalah terselenggaranya Jasa Kebersihan Kantor dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.210.066.270,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 198.438.040,00
- d) Kegiatan Alat Tulis Kantor
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk kelancaran tugas Kantor. Indikator kinerja kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.59.054.154,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 59.054.154,00.
- e) Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Terlayannya Proses Pelayanan Serta Terwujudnya Suasana Kantor yang nyaman. Indikator kinerja kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.3.995.100,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.995.100,00.
- f) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Meningkatkan Wawasan/ Pengetahuan/ Informasi Pegawai. Indikator kinerja

kegiatan adalah tersedianya tersedianya bahan bacaan bagi pegawai target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.18.378.500,00. Realisasi kinerja sebesar 100.00 % dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.314.025,00

- g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat-rapat, tamu dan lembur. Indikator kinerja kegiatan adalah tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat, target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.26.880.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26.880.000,00
- h) Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk kelancaran tugas tugas kedinasan yang dilaksanakan. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya perjalanan keluar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, seminar, Bimtek dan Pameran. Target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.19.011.400,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19.011.400,00.
- i) Kegiatan Upacara Keagamaan
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Terwujudnya Hubungan Harmonis dan Kedamaian Rohani dalam Pelaksanaan Tugas. Ttarget kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.47.290.954,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 46.216.500,00
- j) Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor
Tujuan dilaksanakan untuk menjaga keberfungsian Gedung secara baik. Target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.710.814.460,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 705.022.460,00
- k) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Berfungsi dengan Baik.Target

kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.105.000.000,00. Realisasi kinerja sebesar 100 % dan realisasi anggaran sebesar Rp.104.561.000,00

- l) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk terwujudnya kelancaran tugas-tugas kedinasan, target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.443.698.688,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 429.187.588,00

- m) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini agar Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Berfungsi dengan Baik. Target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.852.656.908,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 779.699.012,00

- n) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja.
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Pedoman Dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Kegiatan. Target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.852.656.908,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 779.699.012,00

Dalam pelaksanaan kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik, Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan, Kegiatan Alat Tulis Kantor, Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah, Kegiatan Upacara Keagamaan, Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor, Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor, Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja kegiatan tersebut diatas tidak terdapat permasalahan.

2) Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

Adapun kegiatan yang mendukung Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Meningkatnya Penerapan Inovasi pada pemerintah Daerah dan Masyarakat dan Terwujudnya Aplikasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Penerbitan Buku Jurnal, Penerbitan Aplikasi E-Jurnal, Dokumen Laporan Pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA, Website Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, terlaksananya rapat koordinasi daerah (rakorda) dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.82.122.425,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp.73.962.425,00
- b) Kegiatan Penyusunan, pengkajian peraturan perundang undangan;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan di Bidang Pemerintahan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator kinerja kegiatan adalah hasil kajian/penelitian dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.9,025,775,00 Realisasi kinerja sebesar 10.00% dan realisasi anggaran sebesar Rp.9,025,775,00
- c) Kegiatan Penyusunan, percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini agar tersedianya Data dan strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Target 100% Realisasi kinerja sebesar 1000% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11,876,500 ,00

- d) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/ Penelitian Bidang Pemerintah Desa;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan. Indikator kinerja kegiatan adalah hasil kajian/penelitian dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.18,292,050,00 Realisasi kinerja sebesar 10.00% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 18,292,050,00
- e) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/ Penelitian Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan. Indikator kinerja kegiatan adalah hasil kajian/penelitian dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.11,960,450,00 Realisasi kinerja sebesar 10.00% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 11,960,450,00
- f) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/ Penelitian Pemecahan Masalah Daerah
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah Terlaksananya tugas-tugas Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Provinsi Bali. Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah Buku Pokok-Pokok Kajian Kelompok Hali Bidang Pembangunan Provinsi Bali. Focus Group Discussion. Jumlah Peserta seminar Nasional dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.6,239,282,035,00 Realisasi kinerja sebesar 1000% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 6,239,282,035,00

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dihadapi yakni Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena terjadi rasionalisasi anggaran akibat pandemi *covid-19*. Terhadap permasalahan

tersebut diatas telah dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan, yakni tetap melakukan kegiatan sesuai anggaran yang tersedia, antara lain: tetap melakukan penerbitan e-Jurnal Bali Membangun Bali (BMB), memaksimalkan jumlah Cetakan Jurnal Bali Membangun Bali, Menjadwalkan Kembali pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah dan beberapa kerjasama dalam penyusunan kajian.

3) Program Prioritas Pembangunan Bali

Adapun kegiatan yang mendukung Program Prioritas Pembangunan Bali, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/Penelitian bidang pangan, sandang dan papan;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah mengetahui Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan di Bidang Prioritas Pembangunan Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang pangan, sandang dan papan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.12,128,625,00- Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 12,128,625,00.
- b) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/Penelitian pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui peningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan di Bidang Prioritas Pembangunan Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang pendidikan, kesehatan, jaminan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.19,868,475,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 19,868,475,00.
- c) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/Penelitian Bidang adat, tradisi, seni budaya dan pariwisata;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan di Bidang

Prioritas Pembangunan Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang adat, agama, tradisi, seni, budaya dan pariwisata dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp. 217,498,875,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 217,498,875,00.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dihadapi adalah adanya *refocusing* anggaran karena pandemi *Covid-19*.

Terhadap permasalahan tersebut diatas, kegiatan tetap dilaksanakan sesuai anggaran yang tersedia.

4) Program Penunjang Pembangunan Bali

Adapun kegiatan yang mendukung Program Penunjang Pembangunan Bali, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/ Penelitian kajian penelitian bidang infrastruktur;
Tujuan kegiatan ini adalah untuk Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan di Penunjang Pembangunan Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah buku hasil-hasil kajian/penelitian Bidang infrastruktur dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.502,389,283,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 502,389,283,00.
- b) Kegiatan Penyusuna, pengkajian/Penelitian Bidang Ekonomi;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan di Penunjang Pembangunan Bali. Indikator kinerja kegiatan adalah buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.17,336,575,00. Realisasi kinerja sebesar 10.00% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 17,336,575,00.
- c) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/Penelitian Bidang Keamanan;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan di Penunjang Pembangunan Bali.

Indikator kinerja kegiatan adalah buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang keamanan dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.94,643,775,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 94,643,775,00.

- d) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/Penelitian Ekonomi Makro. Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan di Penunjang Pembangunan Bali.dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.26,534,400,00 Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 26,534,400,00

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, terdapat permasalahan yang dihadapi adalah kajian tidak optimal dilaksanakan akibat mengalami refocusing anggaran. Terhadap permasalahan tersebut diatas telah dilakukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, yakni dengan tetap memaksimalkan pekerjaan dengan dana yang sehingga kegiatan tetap selesai 100% serta berkoordinasi dengan BPS agar tetap dibantu data-data terkait Makro Ekonomi Bali.

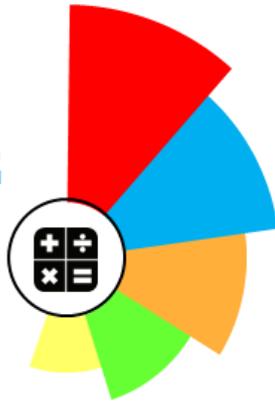
5) Program Pengelola Kekayaan Intelektual

Adapun kegiatan yang mendukung Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, sebagai berikut:

- a) Kegiatan Penyusuna, pengkajian/Penelitian inventarisasi dan fasilitas karya inovasi dan teknologi;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Indikator kinerja kegiatan adalah terlaksananya koordinasi peneliti, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.34,505,925,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 34,505,925,00.

- b) Kegiatan Penyusuna, pengkajian/Penelitian disiminasi hak kekayaan intelektual hasil Riset Dan Inovasi Daerah;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Indikator kinerja kegiatan adalah buku laporan buku hasil sosialisasi dan disiminasi dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.10,792,650,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 10,792,650,00
- c) Kegiatan Penyusunan, pengkajian/pengembangan, penerapan inovasi dan teknologi;
Tujuan dilaksanakan kegiatan ini untuk mengetahui Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat. Indikator kinerja kegiatan adalah pameran HAKTEKNAS FGD dengan target kinerja 100% dan anggaran sebesar Rp.14,121,625,00. Realisasi kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 14,121,625,00
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut diatas, pada Kegiatan Penyusunan, pengkajian/Penelitian inventarisasi dan fasilitas karya inovasi dan teknologi secara prinsip tidak ada. Namun demikian, pada Kegiatan Penyusunan, pengkajian/Penelitian disiminasi hak kekayaan intelektual hasil Riset Dan Inovasi Daerah dan Kegiatan Penyusunan, pengkajian/ pengembangan, penerapan inovasi dan teknologi tidak tercapainya keluaran disebabkan adanya *refocusing* anggaran. Terhadap permasalahan tersebut diatas kegiatan tetap dilaksanakan secara maksimal sesuai dana yang tersedia.

TERJADI *REFOCUSING*
DAN RASIONALISASI
ANGGARAN KEGIATAN
SERTA DALAM
MENDUKUNG
PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19
DENGAN MENUNDA DAN
/ATAU MEMBATALKAN
BEBERAPA KEGIATAN-
PRIORITAS KERISSETAN
SERTA KEGIATAN
PENUNJANG LAINNYA
PADA SEKRETARIAT



- **01 BELANJA DALAM APBD INDUK 2020**
Rp.20.158.458.402,00
- **02 BELANJA DALAM APBD-P 2020**
Rp.9.993.703.473,00
- **03 RASIONALISASI ANGGARAN**
Rp.10.164.754.929,00
- **04 REALISASI FISIK : 100%**
REALISASI KEUANGAN :
Rp.9.944.973.570 (98,51%)



Gambar 2.1

Infografis Pelaksanaan Belanja Badan Riset sesuai Renja 2020

Tabel 2.1 (T.CT-29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali s/d Tahun 2020

Nama Perangkat Daerah: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2019	Tingkat Realisasi(%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2020)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Wajib Non Pelayanan Dasar									
	Bidang Urusan Penelitian dan Pengembangan Daerah									
	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	77	-	-	-	-	77	77	100 %
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya materai	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air	Terbayarnya jasa komunikasi sumber daya air	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %

			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Terselenggaranya jasa kebersihan kantor	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	40 jenis	-	-	-	-	40 jenis	40 jenis	100 %
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
			Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan bagi pegawai	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
			Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat dan tamu	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100%
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	Terlaksananya perjalanan keluar daerah dalam rangka rapat-rapat koordinasi, konsultasi, kunjungan kerja, seminar, bimtek dan pameran.	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
			Upacara keagamaan	Terbayarnya upacara keagamaan	9 Jenis	-	-	-	-	12 bulan	9 Jenis	100 %
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	12 Bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 Bulan	100 %

			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas	Terbayarnya tenaga Non PNS , terpeliharanya kendaraan dinas	12 Bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 Bulan	100 %
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan gedung kantor	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	100 %
			Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Jenis dokumen perencanaan dan pelaporan capain	6 dokumen	-	-	-	-	6 dokumen	6 dokumen	100 %
			Penyediaan bahan logistik kantor	Tabung gas yang disediakan	2 tabung gas	-	-	-	-	0	0	0 % (rasionalisasi)
			Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan pengkajian	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %
			Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan pelaksanaan Sistem Informasi Data.	Penerbitan buku jurnal, penerbitan Aplikasi E-jurnal, laporan pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA, Webside Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, terlaksananya rapat koordinasi daerah (Rakorda)	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	0 dokumen	0 % (rasionalisasi)

			Pengkajian peraturan perundang-undangan	Hasil Kajian atau Penelitian	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0 % (rasionalisasi)
			Percepatan penanggulangan kemiskinan di daerah	Hasil Kajian/Penelitian	75 buku	-	-	-	-	75 buku	0 buku	0 % (rasionalisasi)
			Pengkajian/penelitian bidang pemerintahan Desa	Hasil Kajian/Penelitian	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	0 dokumen	0 % (rasionalisasi)
			Pengkajian/penelitian bidang penyelenggaraan pemerintah	Hasil Kajian/Penelitian	2 dokumen	-	-	-	-	2 dokumen	0 dokumen	0 % (rasionalisasi)
			Pemecahan Masalah Daerah	Buku pokok-pokok pikiran dan kajian kelompok ahli bidang pembangunan Provinsi Bali, Focus Group Discusion, jumlah peserta Seminar Nasional	1 dokumen , 150 peserta	-	-	-	-	1 dokumen 150 peserta	0 dokumen , 0 peserta	100% (rasionalisasi)
			Bidang Prioritas Pembangunan Bali	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah bidang prioritas pembangunan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100 %

			Kajian/penelitian bidang pangan, sandang dan papan.	Buku hasil/hasil kajian/Penelitian bidang pangan sandang dan papan.	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	1 dokumen	25 % (rasionalisasi)
			Kajian/penelitian bidang pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial.	Buku hasil/hasil kajian/Penelitian bidang pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan ketenagakerjaan.	3 dokumen	-	-	-	-	3 dokumen	0 dokumen	0 % (rasionalisasi)
			Kajian/penelitian bidang Adat, Tradisi, Seni Budaya dan Pariwisata	Buku hasil/hasil kajian/Penelitian bidang Dat, Tradisi, Seni Budaya dan pariwisata.	4 dokumen	-	-	-	-	4 dokumen	0 dokumen	0 % (rasionalisasi)
			Program Penunjang Pembangunan Bali	Persentase rekomendasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah bidang penunjang pembangunan.	100%	100 %		100 %			100%	100 %
			Kajian/penelitian bidang infrastruktur	Buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang infrastruktur	5 Dokumen	100 %		100 %		5 dokumen	1 Dokumen	20 % (rasionalisasi)
			Kajian/penelitian bidang ekonomi	Buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang ekonomi	4 Dokumen	100 %		100 %		4 dokumen	4 Dokumen	100 %

			Kajian/penelitian bidang keamanan	Buku hasil-hasil kajian/penelitian bidang keamanan.	1 Dokumen	100 %		100 %		1 dokumen	1 Dokumen	100 %
			Ekonomi Makro	Seminar nasional ekonomi makro	4 Dokumen	100%		100%		4 dokumen	0 Dokumen	0% (rasionalisasi)
			Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual	Persentase Inovasi dan Teknologi yang memperoleh perlindungan hukum	100%	100%		100%			100%	100%
			Pembinaan Inventarisasi dan fasilitasi karya inovasi dan teknologi	Terlaksannya koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS	4 Pemenang 1 Dokumen	100%		100%		0 pemenang 1 dokumen	4 Pemenang 1 Dokumen	100%
			Diseminasi Hak Kekayaan Inteltual Hasil Riset dan Inovasi daerah	Buku laporan, buku hasil sosialisasi dan diseminasi	75 buku	100%		100%		75 buku	0 buku	0% (rasionalisasi)
			Pengembangan, penerapan inovasi dan teknologi	Pameran HAKTEKNAS FGD	1 kali pameran dan FGD	100%		100%		1 kali pameran Hakteknas	0 kali pameran dan FGD	0% (rasionalisasi)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2019 Nomor 7), Badan Riset dan Inovasi daerah adalah Perangkat Daerah yang baru terbentuk tahun 2020. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali yang memiliki tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi, tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara *sakala* dan *niskala* sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga diharapkan capaian dari masing-masing kegiatan nantinya dapat memberikan kontribusi penting atas target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi kinerja
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Seperti diketahui, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengampu misi nomor 22, yakni mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah. Core business BaRI adalah melaksanakan riset dan inovasi serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi Bali, sehingga tujuan yang hendak dicapai adalah terwujudnya hasil riset dan inovasi yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, dengan sasaran capaian tahun 2020 yang ingin diwujudkan adalah:

1. Meningkatnya Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan;
2. Meningkatnya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual

Tabel 2.3

Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dibandingkan Tahun 2020

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2020	% Capaian	Kriteria
1	Meningkatnya Hasil Riset Yang Dimanfaatkan Dalam Perumusan Kebijakan;	100 %	100%	100%	Sangat Baik
	Meningkatnya Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	100%	24 KI	100%	

Tabel 2.4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	-	-	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
2.	-	-	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah Bidang Prioritas Pembangunan	-	-	100%	18,56%	-	-	100%	100%	-
3.	-	-	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah Bidang Penunjang Pembangunan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-
4.	-	-	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Memperoleh Perlindungan Hukum	-	-	100%	75,80%	-	-	100%	100%	-

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali memiliki peranan :

1. **Bekerjasama** dengan berbagai pihak dalam mengembangkan produk unggulan daerah menjadi produk industri unggulan.
2. Melakukan proses **intermediasi dan difusi teknologi** untuk membangun suatu proses pemanfaatan hasil-hasil riset agar dapat dinikmati oleh masyarakat.
3. Mengembangkan **sistem inovasi** dengan mendorong faktor-faktor kunci keberhasilan diantaranya keterkaitan (*linkages*), kemitraan (*partnership*), jaringan (*networking*), interaksi serta sinergi positif.
4. Mengembangkan **klaster inovasi** yang merupakan jembatan yang dapat memfasilitasi komunikasi yang intensif dan kerjasama antara lembaga penelitian dan industri yang ada di Bali.

Dalam penyelenggaraan tugas Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali pada Tahun 2020 melaksanakan 5 (lima) program dan 17 kegiatan, penyelenggaraan tugas dan fungsi tidak terlepas oleh permasalahan yang dihadapi sehingga akan menimbulkan dampak terhadap pencapaian program kegiatan.

A. Hambatan atau Kendala Utama

Keberadaan Perangkat Daerah Badan Riset Dan Inovasi Daerah merupakan jawaban atas beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap belum efektif, efisien, tepat sasaran, dan belum memberikan manfaat yang berkualitas dan merata kepada masyarakat. Oleh karena itu, Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi sumber rekomendasi dan evaluasi kebijakan yang telah ada, atau menjadi rujukan munculnya kebijakan baru, baik itu yang melalui kajian ataupun penelitian dan dapat langsung diimplementasikan. Dengan adanya Perangkat Daerah ini, juga sangat diharapkan munculnya inovasi-inovasi baru dan dikelola kekayaan Intelektualnya sehingga akan mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Bali dan kesejahteraan Masyarakat Bali

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada

penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan Provinsi Bali makin mandiri dan sejahtera. Permasalahan yang dihadapi dalam kelitbangan dan inovasi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasiskan kelitbangan;
2. Belum memiliki data yang memadai tentang hasil penelitian dari Perguruan Tinggi maupun swasta sebagai rujukan dalam pengembangan inovasi daerah;
3. Produk inovasi daerah belum memberi manfaat ekonomi optimal bagi kesejahteraan rakyat karena belum dikomersialisasikan;
4. Kualitas dan kuantitas SDM belum optimal disebabkan oleh mutasi pegawai;
5. Belum memiliki tenaga fungsional peneliti, analis kebijakan, analis perancangan;
6. Produk hukum dalam mendukung pelaksanaan tugas riset dan inovasi, sehingga diperlukan adanya sinergitas Program/Kegiatan Riset dan Inovasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

B. Tindak Lanjut

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut agar tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi Bali dalam penetapan kegiatan berdasarkan kajian/penelitian
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholders dalam mendapatkan data hasil penelitian untuk pengembangan inovasi daerah
3. Melakukan pendataan produk inovasi serta berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dilakukan identifikasi dan inventarisasi produk unggulan untuk komersialisasi
4. Melakukan pengelolaan pegawai dan penempatan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan melalui diklat/ kursus yang dilakukan oleh badan diklat
5. Mengusulkan adanya penambahan tenaga fungsional peneliti, analis kebijakan, analis perancangan produk hukum agar dapat mendukung tugas riset dan inovasi.

C. Dampak Terhadap Pencapaian Program

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2019 Nomor 7), Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Perangkat Daerah yang baru terbentuk tahun 2020. Sehingga belum memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan.

Tabel 2.5(T-C.30)

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Proyeksi			Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun		
				2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2020	2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		(9)	(10)		(11)	(12)		(13)
1.	-	-	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah Bidang Pemerintah dan Pengkajian Peraturan			100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	100%	-
2.	-	-	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah Bidang Prioritas Pembangunan			100%	18,56%	18,56%		-	18,56%	100%	18,56%	18,56%	-

3.	-	-	Persentase Rekomendasi Hasil Kelitbangan dalam Pembangunan Daerah Bidang Penunjang Pembangunan			100%	100%	100%		-	100%	100%	100%	100%	-
4.	-	-	Persentase Inovasi dan Teknologi yang Memperoleh Perlindungan Hukum			100%	75,80%	75,80%		-	75,80%	100%	75,80%	100%	-

2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD Tahun 2021 khususnya untuk program/kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dimana terdiri atas 5 (lima) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. 1 (satu) Program dengan 2 (dua) kegiatan merupakan program pendukung pelaksanaan tupoksi yaitu: Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja, dengan total anggaran sebesar Rp4.195.000.000,- atau 20,91% dari keseluruhan anggaran yang diusulkan dan untuk Program Prioritas terdiri dari 4 (empat) Program dan 15 (lima belas) Kegiatan yaitu: Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Program Prioritas Pembangunan Bali, Program Penunjang Pembangunan Bali dan Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual. Dengan total anggaran sebesar Rp 15.865.320.100,- atau 79,09% dari keseluruhan anggaran yang diusulkan sebesar Rp. 20.060.320.100,-

Hasil Analisis Kebutuhan terkait dengan Program/Kegiatan Tahun 2021 pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali telah sesuai dengan rancangan akhir RKPD 2021.

Tabel 2.6(T-C.31.)
Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022 Provinsi Bali

Nama Perangkat Daerah: Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

RANCANGAN AKHIR										HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	Dps	82	100%	100%	15,385,386,536	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	-	-	Dps	82	100%	100%	15,385,386,536
	Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	-	-	Dps	100%	100%	100%	9,336,716,800	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Hasil Kelitbangan yang Diimplementasikan	-	-	Dps	100%	100%	100%	9,336,716,800

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagai Perangkat Daerah yang merupakan pengembangan dari bagian Litbang Bappeda Provinsi Bali, dimana memiliki tugas melaksanakan Riset dan Inovasi, serta pengelolaan kekayaan intelektual Pemerintah Provinsi yang mendukung tercapainya pembangunan Provinsi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali secara sakala dan niskala sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pada Forum Konsultasi Publik Bappeda Litbang tahun 2021 dimana ada beberapa Usulan Masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat diuraikan dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis di masukan dalam daftar panjang; Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang pada nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah **tidak ada usulan Program dan Kegiatan baru**, hal ini karena Program/Kegiatan yang telah dirancang sudah bisa menjawab permasalahan yang terjadi. Berikut disajikan Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Bali.

TABEL 2.7 (C-32)
 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022
 PROVINSI BALI

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Besaran / Volume	Catatan
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan			
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase tingkat kepuasan					
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun tepat waktu		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 dokumen	

07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah dokumen evaluasi Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali yang tersusun tepat waktu		Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 dokumen		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Persentase Administrasi Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali				
01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	28 dokumen		
03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	600 dokumen		
04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		jumlah laporan akuntansi keuangan		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	5 laporan		
06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan		Kota Denpasar, Denpasar Timur, Dangin Puri	1 dokumen		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Persentase Dokumen Administrasi				

			Umum			
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	16 Jenis	
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	36 Jenis	
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung gas lpg		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	12 kali	
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 Jenis	
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 Jenis	
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	100 persen	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
05	Pengadaan Mebel		Jumlah pengadaan mebel		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 jenis	
10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	8 jenis	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah jenis materai dan benda pos lainnya yang disediakan		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	2 Jenis	
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 jenis	

04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	23 Jenis	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	7 jenis	
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	10 jenis	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Penelitian dan Pengembangan Kelitbangan yang dicapai					
01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan			

02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum		Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali Presentase Implementasi Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Pengkajian Peraturan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen 100 persen	
06	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat		penerbitan buku dan e-jurnal bali membangun bali Presentase penerapan inovasi pada pemerintahan daerah dan masyarakat		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen 100 persen	
08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa		Jumlah desa yang terdata Presentase desa adat yang mampu menyajikan data parahyangan, palemahan dan pawongan		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1000 laporan 100 persen	

12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan		Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	3 dokumen	
13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan		Naskah akademik perda evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku Presentase penerapan rumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan yang berlaku		Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 dokumen 100 persen	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan		Hasil Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi dan Pelaksanaan Seminar		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	5 dokumen	
03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara		Jumlah Dokumen Kajian BUMD		Kota Denpasar, Denpasar Utara,	4 dokumen	

10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan		Jumlah kajian / penelitian bidang perhubungan		Kota Denpasar, Denpasar Utara,	1 dokumen	
04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan		Jumlah Kajian/ Penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan Pelaksanaan FGD bidang pertanian, perkebunan dan pangan; Persentase Kajian/ penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 dokumen 3 kali 100 persen	
09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum		Jumlah Kajian/ Penelitian Pekerjaan Umum		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	
01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		Jumlah dokumen kajian koperasi, usaha kecil dan menengah		Semua Kabupaten/ Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 dokumen	

06	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Jumlah Kajian/ Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Provinsi Bali	1 dokumen	
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata		Jumlah Kajian/ Penelitian Bidang Sosial dan Kependudukan			1 dokumen	
06	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan		Jumlah/ Kajian Bidang Kesehatan			1 dokumen	
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi			Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/ Model Replika dan Inovasi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Roadmap Penguatan SIDA			1 dokumen	
04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan		Jumlah Kegiatan Sosialisasi Hasil Kelitbangan			1 Kegiatan	

05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Invetarisasi data permohonan HKI di Kab/Kota (9 Kab/Kota) Jumlah Fasilitasi Permohonan HKI		Kota Denpasar, Denpasar Utara, Dangin Puri Kangin	1 Dokumen,75 Permohonan KI	
----	-------------------------------------	--	--	--	---	----------------------------	--

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memiliki kaitan dengan program – program yang ada di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. Keterkaitan tujuan, sasaran dan program Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan tujuan, sasaran dan program BRIN dan BPP KEMENDAGRI adalah sebagai berikut :

1. BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Tujuan : Terwujudnya hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis kelitbangan
2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saingdaerah

Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perumusan kebijakan daerah
2. Jumlah Inovasi daerah yang dikembangkan

Program: 1. Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
2. Prioritas Pembangunan Bali
3. Penunjang Pembangunan Bali
4. Pengelolaan Kekayaan Intelektual

2. BALITBANG KEMENDAGRI

Tujuan : Peningkatan kualitas hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri

Sasaran : 1. Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan
2. Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi

Indikator Kinerja Utama : 1. Persentase laporan kelitbangan dengan katagori “baik” atas penilaian TPM
2. Persentase hasil kelitbangan yang masuk dalam jurnal ilmiah

- Program :**
1. Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri
 2. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 3. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintah umum
 4. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 5. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah dan Aparatur

3. KEMERISTEK DIKTI

Tujuan : Peningkatan relevansi, Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia berpendidikan tinggi, serta kemampuan iptek dan inovasi untuk keunggulan daya saing bangsa

Sasaran :

1. Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya IPTEK dan pendidikan tinggi
2. Meningkatnya kapasistas inovasi

Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah Taman Sains dan teknologi yang dibangun
2. Jumlah Pusat unggulan Iptek
3. Jumlah Publikasi internasional
4. Jumlah prototipe R &D(TRL sd. 6)
5. Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna

Program :

1. Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi
2. Program Pengembangan Pusat Unggulan IPTEK
3. Program Penguatan Riset dan Pengembangan
4. Program Penguatan Inovasi

B. Telahaan Terhadap Kebijakan Provinsi

Visi, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan teruang dalam Dokumen RPJMD yang akan dicapai selama 5 tahun mendatang, menjadi tanggung jawab Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, sebagai instansi dengan tugas pokok dan fungsi ***penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi bali di bidang penelitian dan pengembangan***, dimana unsur perencanaan

merupakan tonggak awal untuk pencapaian visi misi Kepala Daerah. Untuk periode 2018- 2023, Visi yang telah ditetapkan Oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Bali, yaitu :***NANGUN SAT KERTHI LOKA BALIMELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA MENUJU BALI ERA BARU Yang mengandung makna***“Menjaga Kesucian dan Keharmonisan Alam Bali Beserta Isinya, untuk Mewujudkan Kehidupan Krama dan Gumi Bali yang Sejahtera dan Bahagia, Sakala-Niskala Sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara Politik, Berdikari secara Ekonomi, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan melalui Pembangunan secara Terpola, Menyeluruh, Terencana, Terarah, dan Terintegrasi **Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila 1 Juni 1945.**”Menuju Bali Era Baru.

Misi merupakan komitmen untuk melaksanakan agenda-agenda utama yang menjadi penentu keberhasilan pencapaian visi pembangunan. Sedangkan tujuan dan sasaran pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi RPJMD Provinsi Bali secara lebih detil, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dimana Badan Riset dan Inovasi daerah Provinsi Bali mengampu misi yang ke-22 yaitu Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif efisien, terbuka, transparan, akuntabel dan bersih serta meningkatkan pelayanan publik terpadu yang cepat, pasti dan murah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Tujuan yang akan dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali adalah Terwujudnya hasil kelitbangan yang di implementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah berbasis kelitbangan
- b. Mengembangkan inovasi daerah untuk

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Perangkat Daerah, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah. Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan arahan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah menurut Rancangan Akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional, dan kebijakan provinsi. Program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut : Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran ,Lokasi Sasaran dan Kebutuhan Dana Indikatif.

BAB IV

RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Tahun 2020 khususnya untuk program /kegiatan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Provinsi Bali terdiri atas 5 (lima) Program dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan. 1 (satu) Program dengan 15 (lima belas) kegiatan merupakan program pendukung pelaksanaan tupoksi yaitu: Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja, dengan total anggaran sebesar Rp3.492.261.402,00. Sementara itu untuk Program Prioritas terdiri dari 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) Kegiatan yaitu: Program Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan total anggaran sebesar Rp.9.721.153.900,00. Program Prioritas Pembangunan Bali total anggaran sebesar Rp.2.867.900.600,00. Program Penunjuang Pembangunan Bali sebesar Rp.3.083.566.400,00, dan Program Pengelolaan Kekayaan Intelektual total anggaran sebesar Rp.993.576.100,00, sesuai dengan Rencana Kerja (Renja) dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rencana kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali meliputi rencana program dan kegiatan yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Perumusan rencana program dan kegiatan pada tahap ini merupakan penyesuaian antara identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan prioritas program dan kegiatan OPD menurut Rancangan Akhir RKPD, serta mempertimbangkan hasil telaahan kebijakan nasional dan kebijakan Provinsi.

Adapun rincian rencana kerja dan pendanaan pada tahun anggaran 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 Tabel 4.1 Rencana Kerja Tahun 2022 dan perkiraan maju tahun 2022 sebagai berikut :

TABEL 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022

Organisasi/SUB PD : 4.07.01.01 - Badan Riset dan Inovasi Daerah

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022						Target Capaian Kinerja 2023		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target
				Program	Out put Sub Kegiatan	Outcome Kegiatan					
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN											
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			24,722,103,336				33,391,145,333
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86,070,150				94,677,165
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali		Kota Denpasar		12 dokumen		39,999,750 (PAD)		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	12 dokumen	43,999,725

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali		Kota Denpasar		5 dokumen		46,070,400 (PAD)		Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	5 dokumen	50,677,440
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali				Persentase Administrasi Keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali	12,010,334,630				12,985,297,705
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar		Kota Denpasar		28 dokumen		11,992,703,030	DAU	Jumlah Dokumen Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayar	28 dokumen	12,967,147,705
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi		Kota Denpasar		600 dokumen		11,000,000	(PAD)	Jumlah Dokumen SPJ yang Di Verifikasi	600 dokumen	12,100,000
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan akuntansi keuangan		Kota Denpasar		5 laporan		3,331,600	(PAD)	Jumlah laporan akuntansi keuangan	5 laporan	2,420,000
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan		Kota Denpasar		1 dokumen		3,300,000	(PAD)	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen	3,630,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Umum				Persentase Dokumen Administrasi Umum	391,430,040				661,780,625

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		Kota Denpasar,		10 Jenis		12,524,000 (PAD)		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	10 Jenis	23,107,700
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan		Kota Denpasar		44 Jenis		41,005,140 (PAD)		Jumlah Alat Tulis Kantor Yang Disediakan	44 Jenis	55,457,325
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Kota Denpasar		10 Jenis		142,416,500 (PAD)		Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10 Jenis	168,850,000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Kota Denpasar		12 Jenis		23,880,400 (PAD)		Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Jenis	26,268,000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang Disediakan		Kota Denpasar		4 Jenis		37,200,000 (PAD)		Jumlah Surat Kabar/Majalah Yang Disediakan	4 Jenis	40,920,000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Kota Denpasar		100 persen		134,404,000 (PAD)		Presentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 persen	347,177,600
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					337,320,000				712,932,000

Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel		Kota Denpasar		3 jenis		133,800,000 (PAD)	Jumlah Jenis Pengadaan Mebel	5 jenis	212,300,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya		Kota Denpasar		8 jenis		203,520,000 (PAD)	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	8 jns	500,632,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	532,496,036	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	574,176,060
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan		Kota Denpasar		1 Jenis		2,480,000 (PAD)	Jumlah Jenis Perangko, Materai, dan Benda Pos Lainnya yang Disediakan	1 Jenis	2,728,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik		Kota Denpasar		3 Jenis		226,000,000 (PAD)	Jumlah penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	3 Jenis	236,265,700
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan		Kota Denpasar		34 Jenis		304,016,036 (PAD)	Jumlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor Yang Disediakan	34 Jenis	335,182,360

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,027,735,680				3,202,255,034
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara		Kota Denpasar		10 unit		761,128,032	(PAD)	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Dipelihara	10 unit	1,165,291,195
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya		Kota Denpasar		15 Jenis		1,266,607,648	(PAD)	Jumlah pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	15 Jenis	2,036,963,839
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			9,336,716,800				15,160,026,745

<p>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</p>	<p>Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali</p> <p>Jumlah Laporan FGD Terkait Kajian Kebijakan Pemerintah</p> <p>Jumlah Seminar Nasional</p> <p>Presentase Implementasi Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</p>		<p>Provinsi Bali</p>		<p>4 Dokumen</p> <p>3 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>100 persen</p>		<p>7,217,820,100 (PAD)</p>		<p>Jumlah Dokumen Laporan Kajian Kelompok Ahli Pembangunan Pemerintah Provinsi Bali</p> <p>Jumlah Laporan FGD Terkait Kajian Kebijakan Pemerintah</p> <p>Jumlah Seminar Nasional</p> <p>Presentase Implementasi Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum</p>	<p>4 Dokumen</p> <p>3 Dokumen</p> <p>1 Dokumen</p> <p>100 persen</p>	<p>8,733,562,310</p>
<p>Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa</p>	<p>Analisa Data Sensus</p> <p>Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan</p>		<p>Provinsi Bali</p>		<p>1 Dokumen</p> <p>100 Persen</p>		<p>350,000,000 (PAD)</p>		<p>Jumlah desa yang terdata</p> <p>Persentase desa adat yang mampu menyajikan data parahyangan, palemahan dan pawongan</p>	<p>1 Dokumen</p> <p>100 persen</p>	<p>890,424,370</p>

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	8,217,820,100				11,035,359,830
Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	IKKD IPKD Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		Provinsi Bali		1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 100 persen		212,413,500 (PAD)		IKKD IPKD Penerbitan Buku dan E-jurnal Bali Membangun Bali Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen 1 Dokumen 3 Dokumen 100 persen	280,391,540
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	Dokumen Evaluasi		Provinsi Bali		5 Dokumen		437,586,500 (PAD)		Dokumen Evaluasi	5 Dokumen	250,981,610

	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				100 persen				Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	100 persen	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan		Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	745,000,000				2,769,446,631
Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Hasil Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi		Provinsi Bali		1 Dokumen		175,000,000 (PAD)		Hasil Kajian/ Penelitian Bidang Ekonomi	1 Dokumen	102,461,590
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Kajian/ Penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan Persentase Kajian/ penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan		Provinsi Bali		2 Dokumen 100 persen		320,000,000 (PAD)		Jumlah Kajian/ Penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan Persentase Kajian/ penelitian bidang pertanian, perkebunan dan pangan yang direkomendasikan	2 Dokumen 100 persen	792,112,041

Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Kajian/ Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral		Provinsi Bali		1 Dokumen		250,000,000 (PAD)	Jumlah Kajian/ Penelitian Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen	550,000,000
Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi				Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi	373,896,700			634,555,724
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replika dan Inovasi dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDA				1 Dokumen		101,702,800 (PAD)	Dokumen laporan pelaksanaan Roadmap penguatan SIDA	1 Dokumen	183,608,480
	Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS							Jumlah koordinasi penelitian, pengembangan, penghargaan dan penerapan IPTEKS		
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangan				1 Kegiatan		99,999,800 (PAD)	Jumlah kegiatan sosialisasi hasil kelitbangan	1 Kegiatan	341,332,354
	Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas)				1 Kegiatan			Mengikuti pameran tingkat nasional (Harteknas)	1 Kegiatan	
	Persentase inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan				100 persen			Persentase inovasi dan penerapan teknologi yang dilaksanakan	100 persen	

Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitas Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Persentase Hak Kekayaan Intelektual Yang Dihasilkan		Provinsi Bali		75 pemohon 1 Dokumen 100 persen		172,194,100 (PAD)	Fasilitas Permohonan HKI Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Inventarisasi Data Permohonan HKI di (9Kab/Kota) Persentase Hak Kekayaan Intelektual Yang Dihasilkan	75 pemohon 1 Dokumen 100 persen	109,614,890
-------------------------------------	--	--	---------------	--	---	--	-------------------	--	---	-------------

BAB V

PENUTUP

5.1 Catatan Penting

Rancangan Akhir Renja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Bali Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 dilingkup Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah sesuai Visi dan Misi Gubernur Bali yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 menuju Bali Era Baru.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 dilakukan dengan mempertimbangkan aspek legalitas, kebersamaan dengan menampung berbagai masukan dari berbagai pihak utamanya stakeholders terkait, sehingga berhasil disusun dokumen perencanaan untuk satu tahun ke depan. Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman bagi jajaran Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dengan demikian seluruh jajaran di Kantor Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali terikat akan dokumen perencanaan ini. Optimalisasi pelaksanaan Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.

Dengan adanya Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali tahun 2022, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan, bersama seluruh organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022, memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- a. Memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja induk tahun 2020.
- b. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
- c. Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai
- d. Memperhatikan keberlanjutan dalam menjawab berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah di tingkat Perangkat Daerah, sebagai wujud nyata dan tanggung jawab Pemerintah dalam membangun daerah.

5.3 Tindak Lanjut

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 sebagaimana tujuannya, diharapkan dapat dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sebagai dasar penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 yang dapat dimanfaatkan oleh jajaran di Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sendiri maupun stakeholder terkait yang berkepentingan. Semoga Rancangan Akhir Renja ini dapat dipedomani sebagai alat kendali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan sampai dengan evaluasi kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali Tahun 2022.

KEPALA BADAN



I MADE GUNAJA

NIP. 19640620 199003 1 012